BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : SUARA PEMBARUAN
Subyek : Perubahan Iklim
Edisi : 26/September/2007
Hari : Rabu
Halaman : 6

Walhi Kritik Program Insentif Karbon

[JAKARTA] Sikap Pemerintah Indonesia yang memperjuangkan program insentif karbon mendapat kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Direktur Eksekutif Walhi, Chalid Muhammad, mengatakan, sikap Indonesia itu tidak efektif, khususnya menghadapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (COP) ke-13 di Bali, awal Desember 2007.

"Kita tidak akan memiliki kekuatan apa-apa jika hanya memperjuangkan insentif karbon. Harusnya yang diperjuangkan adalah keadilan iklim," kata Chalid, kepada *SP*, di Jakarta, Rabu (26/9).

Insentif karbon adalah suatu mekanisme kompensasi yang diberikan kepada negara-negara yang memiliki hutan tropis untuk menjaga hutannya dengan tujuan menyerap karbon (karbondiok-sida/CO2) yang berasal dari negara-negara maju.

Menurut Chalid, jika pemerintah bertujuan mendapat dana dari insentif tersebut, Indonesia tidak lebih dari satuan pengamanan (satpam) yang ditugaskan untuk menjaga dan melindungi hutan. Akibat dari menerima insentif tersebut, kata Chalid, Indonesia tidak akan bisa menekan negara-negara maju untuk menghentikan emisi gas rumah kaca mereka.

Dia mengatakan, hutan Indonesia dipertahankan bukan untuk tujuan menyerap karbon tetapi untuk keberlangsungan lingkungan hidup Indonesia sendiri. Hutan yang rusak menyebabkan bencana lingkungan di sekitar hutan itu berada, seperti longsor dan banjir bandang.

Dalam laporan persiapan pelaksanaan COP 13 dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa dari sektor kehutanan Indonesia berpotensi memperoleh sedikitnya US$ 6 miliar per tahun jika mampu memperkecil laju penghilangan hutan (deforestasi).

Perhitungannya, saat ini 20 persen emisi global dari deforestasi sebanyak 7,5 miliar ton CO2 di mana Indonesia menyumbang 1/3 dari jumlah tersebut, yakni sekitar 2,5 miliar ton CO2 dari laju deforestasi atau sekitar dua juta hektare (ha) per tahun. [E-7]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup